



## **BUPATI SITUBONDO**

### PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 31 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan sesuai amanat undang-undang, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
6. Prestasi akademik adalah kemampuan, kecakapan, dan prestasi yang dapat dinilai ataupun diukur dengan menggunakan tes yang baku.
7. Prestasi Non Akademik adalah kemampuan dan kecakapan di luar prestasi akademik.
8. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud pemberian beasiswa adalah untuk membantu meringankan beban orang tua mahasiswa serta untuk mendorong aktivitas dan kreativitas mahasiswa.

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Situbondo agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
- b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat bagi mahasiswa berprestasi di Kabupaten Situbondo;
- c. menekan angka *droup out* mahasiswa berprestasi karena permasalahan biaya pendidikan.

## BAB III JENIS DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 4

- (1) Jenis beasiswa meliputi :
  - a. beasiswa mahasiswa tidak mampu;
  - b. beasiswa mahasiswa berprestasi; dan
  - c. beasiswa mahasiswa Pascasarjana strata dua (S2).
- (2) Jumlah penerima beasiswa mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Jumlah penerima beasiswa mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah penerima beasiswa mahasiswa tidak mampu.
- (4) Jumlah penerima beasiswa mahasiswa pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak sejumlah 5 (lima) mahasiswa.

## Bagian Kedua Sasaran

### Pasal 5

- (1) Sasaran pemberian beasiswa adalah mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan pada :
  - a. Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi serendah-rendahnya B.
- (3) Program studi yang diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa, meliputi :
  - a. Kedokteran Umum;
  - b. Kedokteran Gigi;
  - c. Akuntansi;
  - d. Sistem Informasi;
  - e. Teknik Mesin;
  - f. Ilmu Ekonomi;
  - g. Ilmu Administrasi Negara;
  - h. Ilmu Kesehatan Masyarakat;
  - i. Ilmu Keperawatan;
  - j. Teknik Komputer; dan
  - k. Perikanan.
- (4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi serendah-rendahnya B.

## BAB IV SIFAT

### Pasal 6

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan akan dievaluasi setiap tahun.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 4 (empat) semester bagi strata dua (S2), 8 (delapan) semester bagi strata satu (S1) atau Diploma Empat (D4) dan paling lama 6 (enam) semester bagi diploma tiga (D3) dengan evaluasi perkembangan akademik setiap semester, berdasarkan ketentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut :
  - a. Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. Perguruan Tinggi Swasta, IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima).

## BAB V PERSYARATAN

### Pasal 7

- (1) Syarat umum untuk mendapatkan beasiswa adalah :
  - a. penduduk asli Situbondo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
  - b. terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan bukti daftar ulang dari perguruan tinggi;
  - c. tidak sedang menerima beasiswa lain;
  - d. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
  - e. mengisi surat pernyataan bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Daerah sesuai bidangnya setelah lulus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

(2) Syarat khusus mendapatkan beasiswa adalah :

a. Beasiswa mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

1. Lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah;
2. Berasal dari rumah tangga dengan kategori sangat miskin/ miskin/ hampir miskin dan rentan miskin yang dibuktikan dengan nomor rumah tangga miskin daerah yang berasal dari Data Tunggal Daerah – Analisis Kependudukan Partisipatif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
3. Bagi lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat memiliki prestasi akademik peringkat 1 – 10 (satu sampai sepuluh) di SMA/SMK/MA/MAK yang dibuktikan dengan fotokopi rapor semester 1 sampai semester 5 yang disahkan oleh Kepala Sekolah; dan
4. Bagi yang telah berstatus mahasiswa memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta akreditasi A dan IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) untuk perguruan tinggi swasta selama 2 semester terakhir; atau
5. Memiliki prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Kabupaten;
6. Berusia maksimal 21 tahun saat mendaftar.

b. Beasiswa mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

1. Lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah;
2. Berasal dari rumah tangga dengan kategori tidak miskin yang dibuktikan dengan nomor rumah tangga miskin daerah yang berasal dari Data Tunggal Daerah – Analisis Kependudukan Partisipatif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

3. Memiliki prestasi akademik peringkat 1 – 5 (satu sampai lima) di SMA/SMK/MA/MAK yang dibuktikan dengan fotokopi rapor semester 1 sampai semester 5 yang disahkan oleh Kepala Sekolah; atau
  4. Bagi yang telah berstatus mahasiswa memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta akreditasi A dan IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) untuk perguruan tinggi swasta selama 2 semester terakhir; atau
  5. Memiliki prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Provinsi atau sertifikat Hafal Al-Quran paling sedikit 15 juz atau prestasi keagamaan lainnya yang dibuktikan dengan keterangan dari lembaga yang berwenang.
  6. Berusia maksimal 21 tahun saat mendaftar;
- c. Beasiswa mahasiswa pascasarjana strata dua (S2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
1. Lulusan sarjana strata satu atau sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang pascasarjana atau Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah;
  2. Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima);
  3. Perguruan Tinggi Swasta, IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol).
  4. Berasal dari rumah tangga dengan kategori sangat miskin/ miskin/ hampir miskin dan rentan miskin yang dibuktikan dengan nomor rumah tangga miskin daerah yang berasal dari Data Tunggal Daerah – Analisis Kependudukan Partisipatif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; atau
  5. Memiliki prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Provinsi atau sertifikat Hafal Al-Quran paling sedikit 20 juz atau prestasi keagamaan lainnya yang dibuktikan dengan keterangan dari lembaga yang berwenang;
  6. Berusia maksimal 27 tahun saat mendaftar.

BAB VI  
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan seleksi dan verifikasi bagi calon penerima program beasiswa dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
  - b. Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Situbondo;
  - c. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
  - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; dan
  - f. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kabupaten Situbondo.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
  - b. melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima beasiswa;
  - c. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan beasiswa.
- (4) Calon penerima beasiswa yang telah lulus seleksi diusulkan kepada Bupati dengan dilampiri Berita Acara Hasil Seleksi dan Verifikasi dari Panitia Seleksi, guna ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo.

Pasal 9

- (1) Komponen beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberikan terdiri atas:
  - a. biaya kuliah (Uang Kuliah Tunggal/SPP);
  - b. biaya hidup.
- (2) Khusus untuk mahasiswa penerima beasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Situbondo hanya mendapatkan biaya kuliah dan bantuan

transport namun tidak mendapatkan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (3) Besaran pembiayaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.
- (4) Rincian besaran pembiayaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VII

### PEMBATALAN PEMBERIAN BEASISWA

#### Pasal 10

- (1) Pemberian beasiswa dapat dibatalkan, apabila:
  - a. Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa atau kecamatan setempat;
  - b. Tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan Drop Out (DO) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
  - c. Ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
  - d. Menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain;
  - e. Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana;
  - f. Yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi;
  - g. Selama dua semester berturut-turut IPK menurun atau kurang dari 3,00 bagi Universitas Negeri atau kurang dari 3,25 bagi Universitas swasta yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dari Perguruan Tinggi; dan/atau
  - h. Mahasiswa yang menikah / hamil dalam kurun waktu masa studi.
- (2) Jika mahasiswa yang bersangkutan terbukti menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka beasiswa yang telah diterima wajib dikembalikan ke kas daerah.

BAB VIII  
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Beasiswa untuk biaya kuliah dan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disalurkan langsung kepada rekening mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran beasiswa karena proses administrasi, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib membayar sendiri biaya kuliah dan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) untuk sementara.
- (3) Jika proses administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah selesai, biaya kuliah dan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) disalurkan langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan, dengan persyaratan mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan kuitansi / tanda pembayaran asli dari universitas kepada Dinas untuk penggantian.
- (4) Persyaratan pencairan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang harus dipenuhi:
  - a. Foto Copy rekening pribadi;
  - b. Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;
  - c. Kartu Hasil Studi (KHS), dikecualikan bagi mahasiswa baru;
  - d. Bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT/SPP); dan
  - e. Laporan Hasil Analisis Rumah Tangga dari Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 12

Anggaran untuk pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X  
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian beasiswa.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat selaku unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan eksternal baik secara individu maupun kelompok.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Situbondo yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 7 Juli 2020  
BUPATI SITUBONDO,

ttd  
DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 7 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd  
SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 32

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009